

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta (Anggota IKAPI).

Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Kusmaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan kedua, PT. Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

S, Nasution, 1992, *Metode, Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta

Sumardjono, Maria SW, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang.

Wiyono, R, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324 .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Kode Etik Notaris - Ikatan Notaris Indonesia ( INI)

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah - Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

**c. Tesis, Artikel, Jurnal Ilmiah dan Makalah Seminar**

Anisitus Amanat Gaham, “Peraturan Wajib Lapo PPATK Bagi Notaris-PPAT (Materi Muatan, Mekanisme dan Sanksinya)” *Makalah* yang disampaikan dalam Rakerwil & *Up Grading Course* Sosialisasi Wajib Lapo PPATK Bagi Notaris/PPAT, yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah INI Jawa Tengah, di Magelang, 4 November 2015

Arie Syahrur, 2012, “Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyelidikan Perkara Pidana”, *Tesis* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta.

Fithriadi Muslim, "Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Journal on Anti Money Laundering*, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia, Research Center for AML-CFT (IRCA), 2013

Hery Kiswanto, 2014, “Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Listyaningsih, 2014, “Peranan Perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang”, *Tesis* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutan Remi Sjahdeini, “Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.

T. Gayus Lumbuun, Hak Ingkar Notaris, *Makalah* disampaikan dalam Seminar Hukum dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun INI ke-107, Solo, 14 November 2015.

Yunus Husein (Deputi Direktur DHK dan Anggota Tim RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), ” Upaya Pemberantasan Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, *Makalah* disampaikan dalam Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002.

#### **d. Internet**

Agus Santoso, “Sebuah Diskursus Wajib Lapor Profesi Penjaga Gawang”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ecef1de93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjaga-gawang>, diakses pada tanggal 23 November 2015.

“Peran Notaris Dalam Kasus Djoko Susila”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e370a2338ed/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo>, diakses pada tanggal 23 November 2015.

#### **e. Hasil Wawancara**

Ferti Srikandi Sumanthi, S.H., Spesialis Hukum Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, pada tanggal 29 April 2016

Notaris dan PPAT Mochammad Ikhwanul Muslimin, S.H., Ketua Pengurus Wilayah INI DIY, di Yogyakarta, pada tanggal 18 April 2016

Notaris dan PPAT Hitaprana, S.H, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT DIY di Sleman  
pada tanggal 7 April 2016

Notaris dan PPAT Diana Hexa Dewi, Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kota  
Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016.

Notaris dan PPAT Budi Suryanto, Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten  
Sleman pada tanggal, 19 April 2016.

Notaris dan PPAT Mustofa, S.H , di Yogyakarta, pada tanggal 11 April 2016

Notaris dan PPAT Bimo Seno Sanjaya, S.H , di Yogyakarta, pada tanggal 12  
April 2016

Notaris dan PPAT Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H, di Yogyakarta,  
pada tanggal 14 April 2016

Notaris dan PPAT Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, di Yogyakarta,  
pada tanggal 16 April 2016

Notaris dan PPAT Sumendro, S.H, di Sleman, pada tanggal 13 April 2016

Notaris dan PPAT Tri Niken Tiyas Tirlin, S.H., di Sleman, pada tanggal 21  
April 2016

Notaris dan PPAT Antonius Yohanes De Brito Gunarto, S.H., di Sleman,  
pada tanggal 19 April 2016